

# Membangun Demokrasi Melalui Pengembangan Jaringan Dukungan

*By Ari Darmastuti*



parlemen se dunia tersebut tidaklah berarti bahwa demokrasi selama ini telah mengikutsertakan perempuan dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan. Pernyataan normatif tersebut juga tidak berarti masyarakat telah memandang hak politik perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak azasi manusia. Hasil riset organisasi parlemen se dunia yang dilakukan tahun 1999 terhadap praktek politik di 65 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikemukakan dalam buku yang telah dirujuk di sini menunjukkan bahwa diskriminasi politik terhadap perempuan terjadi di hampir seluruh penjuru dunia. Diskriminasi tersebut terjadi bukan hanya dalam sikap dan tindakan, tetapi juga dalam cara pandang yang menilai bahwa dunia politik bukanlah dunia yang cocok untuk perempuan. Seorang responden dari salah satu negara di Eropa Tengah menyatakan bahwa meski secara tradisional perempuan merupakan pelaku ekonomi dan pekerja ekonomi aktif, tetapi baik laki-laki maupun perempuan masih melihat peran sebagai ibu serta dunia rumah tangga dan perkawinan sebagai pencapaian terbaik dan hal terpenting bagi perempuan; sementara itu dunia politik adalah urusan laki-laki karena perempuan dipandang terlalu emosional untuk berurusan dengan masalah-masalah Negara.

5

Di tingkat nasional, pemerintah secara normatif telah menyediakan berbagai kerangka hukum dan kebijakan<sup>6</sup> untuk menghapuskan diskriminasi gender dan pemberdayaan perempuan. Meski demikian, berbagai data agregat menunjukkan bahwa perempuan belum menjadi pelaku aktif dalam kehidupan politik sebagaimana dilakukan laki-laki. Di kalangan eksekutif, khususnya pada jabatan tinggi, persentase perempuan sangat rendah. Dalam jajaran Kabinet sekarang, hanya terdapat 3 (tiga) orang Menteri dari puluhan menteri yang ada. Dari 33 orang gubernur di seluruh Indonesia, hanya terdapat seorang perempuan sebagai gubernur. Persentase perempuan di DPR juga rendah, belum pernah mencapai angka 20%. Angka tertinggi dicapai pada keanggotaan DPR periode 2009-2014 dengan capaian 16.5%. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dari capaian sebelumnya yang hanya 11.5% pada periode keanggota DPR 2004-2009 yang juga merupakan peningkatan dari periode keanggotaan 1999-2004 yang hanya 9%.<sup>7</sup>

Keberhasilan peningkatan keterwakilan politik perempuan secara konsisten pada masa reformasi merupakan hasil kerja keras berbagai komponen masyarakat, khususnya kalangan aktivis perempuan baik dari kalangan politisi, akademisi, LSM, birokrat, maupun dari kalangan organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lain. Keberhasilan peningkatan keterwakilan politik ini

<sup>5</sup> Op.Cit. hal. 20.

<sup>6</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2023 dalam tujuan RPJMN kedua(2010-2014) tentang peningkatan kesetaraan gender; Inpres nomor 9/2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

<sup>7</sup> Ari Darmastuti. 2011. *Perempuan dalam Relasi Kekuasaan di Partai Keadilan Sejahtera Periode Kepengurusan 2005-2010*. Universitas Indonesia: Disertasi pada PPS Ilmu Politik. Hal.: Lampiran

merupakan aspek penting dalam upaya membangun demokrasi melalui pemberdayaan perempuan sebagai aktor politik karena keberadaan perempuan dalam dunia politik diyakini akan memperbaiki beberapa aspek penting dalam demokrasi, antara lain: (1) perubahan dalam prioritas dan hasil-hasil urusan publik; (2) perubahan dalam proses pengelolaan urusan masyarakat; (3) perubahan dalam perilaku dan praktek masyarakat; (4) proses politik yang lebih luas dan kaya; (5) Respon masyarakat yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat; (6) Respon masyarakat yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan; (7) Perubahan kearah kesetaraan gender yang sesungguhnya; (8) demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang lebih baik; (9) Pendekatan pemecahan masalah dengan cara saling mendengarkan; (10) Keyakinan masyarakat yang lebih tinggi terhadap proses politik; (11) Perubahan penggunaan gaya dan bahasa dalam masyarakat.<sup>8</sup> Berbagai aspek ideal ini hanya akan dapat dilakukan jika kelompok perempuan secara konsisten dapat terus meningkatkan kinerja politik mereka baik dalam bentuk meningkatkan kuantitas keterwakilan politik maupun dalam kualitas kinerja sebagai actor politik.

Paper ini akan memaparkan analisis atas upaya berbagai komponen perempuan di Provinsi Lampung dalam membangun demokrasi melalui pengembangan jaringan dukungan bagi pemberdayaan politik perempuan, dan secara khusus memaparkan upaya penulis untuk mengambil bagian penting dalam upaya tersebut, khususnya melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi yang penulis lakukan. Secara teknis paper dibagi menjadi beberapa bab agar isi dapat disampaikan secara sistimatis. Pembagian bab juga dimaksudkan untuk mempermudah pembaca memahami upaya-upaya khusus yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan jaringan dukungan bagi pemberdayaan politik perempuan. .

### **Membangun Kesadaran Perempuan Melalui Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Perempuan**

Awal reformasi yang ditandai tumbangnya pemerintahan semi militeristik Orde Baru menumbuhkan harapan bahwa kehidupan demokrasi politik di Indonesia akan lebih baik dalam arti akan lebih terbuka, partisipatif dan responsif terhadap kehendak publik. Respon pertama penulis terhadap kejadian itu adalah munculnya keyakinan penulis bahwa itulah saatnya untuk sungguh-sungguh membangun demokrasi dengan cara membangun kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, khususnya bagi perempuan. Keyakinan ini tidak berarti bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah Orde Baru tidak memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Tetapi terminologi demokrasi Pancasila tidak memiliki makna ketika mobilisasi politik menggantikan partisipasi mandiri yang menjadi persyaratan demokrasi. Partisipasi mandiri sebagai ekspresi kebebasan (*freedom*) adalah nilai utama demokrasi seperti dinyatakan oleh Aristotelle<sup>9</sup>. Jika partisipasi mandiri sebagai ekspresi kebebasan tidak ada maka sesungguhnya tidak ada demokrasi. Tiadanya kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat membuat penulis tidak

<sup>8</sup> Inter-Parliamentary Union. 2000. *Politics: Women's Insight*. Geneva. Series "Reports and Documents" Number 36. Hal. 30-53

<sup>9</sup> David E. Apter. 1995. *Pengantar Analisi Politik*. Jakarta: Rajawali Press



bersemangat melakukan pemberdayaan politik bagi perempuan di luar kegiatan kuliah karena menimbulkan kecurigaan dan tekanan dari pihak penguasa.

Sebagai langkah awal, melalui posisi penulis sebagai Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Lampung, pada bulan awal 2000 penulis mengundang berbagai tokoh perempuan di Provinsi Lampung untuk bersama-sama membangun kaukus perempuan dan politik. Langkah ini didasari pengetahuan dan praktek di beberapa negara demokrasi bahwa keberadaan kaukus membantu menyatukan energi berbagai segmen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu masalah atau isu yang sama. Dari berbagai kelompok yang diundang, hanya dua (dua) orang yang datang, yaitu ibu Nur'aini Effendi selaku Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung dan ibu Sri Atidah selaku ketua PDI-P Provinsi Lampung. Dalam pertemuan ini penulis baru menyampaikan gagasan tentang perlunya perempuan Lampung bersatu untuk menyatukan kekuatan agar dapat mengisi pembangunan politik dengan lebih baik. Dilihat dari respon yang muncul baik secara kuantitatif dilihat dari jumlah peserta yang hadir maupun tanggapan kedua tokoh tersebut terhadap ide penulis, terlihat bahwa ide tersebut masih sangat asing bagi mereka. Hal ini disebabkan mereka belum pernah mendengar tentang kaukus dan belum melihat urgensinya untuk dibentuk.

Meski demikian penulis tidak berhenti hanya karena ide tersebut kurang mendapat tanggapan. Melalui jaringan penulis dengan organisasi lain di birokrasi dan ormas, penulis tetap mensosialisasikan perlunya kaukus perempuan politik kepada berbagai segmen perempuan di partai-partai politik dan eksekutif. Bersamaan dengan itu, sebagai realisasi Instruksi Presiden nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung dibentuk. Biro ini termasuk salah satu Biro Pemberdayaan Perempuan yang pertama kali dibentuk di seluruh Indonesia setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Biro ini menjadi partner utama Pusat Studi Wanita dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan mendorong tumbuhnya jaringan organisasi perempuan.

Bersamaan dengan pembahasan RUU Pemerintah Daerah (yang kemudian menjadi UU nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), berbagai kelompok perempuan di partai-partai politik di Provinsi Lampung mulai merespon ide penulis tentang kaukus perempuan dan politik. Penyebabnya adalah karena dalam draft RUU tersebut, salah satu pasalnya merencanakan untuk mencantumkan ketentuan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dari partai politik. Tokoh-tokoh perempuan dari berbagai partai politik baru menyadari bahwa perempuan tidak memiliki *pool of resources* yang memadai untuk bisa memenuhi ketentuan "kuota" tersebut. Perempuan dari berbagai partai politik perlu bekerjasama agar ketentuan tersebut bias terpenuhi. Saat inilah kemudian menjadi awal mula berdirinya kaukus perempuan politik di Provinsi Lampung.

Kaukus perempuan politik tidak hanya terdiri dari perempuan dari partai politik, tetapi juga dari organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa, dan akademisi. Sejak itu penulis selalu menjadi bagian dari organisasi ini dalam posisi sebagai dewan pakar. Meski kaukus perempuan politik di Provinsi Lampung mengalami pasang surut, tetapi eksistensinya masih dinilai penting dan masih menjadi salah satu lembaga untuk pemberdayaan politik bagi perempuan. Meski target pendirian kaukus di Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung tidak terpenuhi, tetapi keberadaan kaukus efektif menjadi mesin penekan bagi partai agar melakukan pemberdayaan politik perempuan secara internal karena hal itu menunjukkan kepedulian dan keberpihakan partai politik kepada perempuan. Hal ini akan menjadi iklan yang baik partai politik. Hasil terbesar dari upaya kaukus perempuan dan politik adalah bahwa semenjak tahun 2004, capaian keterwakilan politik perempuan di Provinsi Lampung selalu lebih tinggi dibanding capaian nasional, yaitu 22% pada keanggotaan 2004-2009 dan 20% pada keanggotaan 2009-2014.

Bersamaan dengan mulai bekerjanya mesin kaukus perempuan dan politik, bersama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan, Pusat Studi Wanita Universitas Lampung dan khususnya penulis mendorong dibentuknya lembaga-lembaga sejenis pada berbagai Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Reaksi berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berbeda-beda. Ada yang cepat merespon dan membentuk lembaga untuk itu, tetapi juga ada yang lambat meresponnya. Pada masa awal, beberapa Kabupaten/Kota membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan atau Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dalam Bagian yang lain. Saat ini mayoritas Kabupaten/Kota menyatukan Bagian Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Kependudukan dan membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau Badan PPKB.

Jika keberadaan organisasi kaukus perempuan dan politik menjadi sarana yang dibutuhkan untuk melakukan advokasi kepentingan perempuan di partai politik, maka keberadaan lembaga yang mengurus isu perempuan di eksekutif menjadi mekanisme efektif untuk mempengaruhi strategi, program, kebijakan, kegiatan, penganggaran serta monev pembangunan agar responsif gender. Melalui kerjasama erat dengan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Provinsi Lampung, Pusat Studi Wanita dan penulis mendorong diadakannya dialog dengan tokoh-tokoh budaya dan agama tentang hak perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender, Serial dialog ini penting karena dalam teori gender dan politik<sup>10</sup>, resistensi terkuat terhadap pengarusutamaan gender dan pemberdayaan politik bagi perempuan berasal dari praktek budaya patriarkhis dan interpretasi yang salah atas ajaran agama, khususnya diktum tentang kepemimpinan laki-laki bagi perempuan. Selain mengadakan serial dialog budaya dan agama, kerjasama ini juga menghasilkan dibentuknya lembaga untuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dalam bentuk Lembaga Indoman Puteri (LIP) dan Unit Pelayanan Khusus Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK). Lembaga Indoman Puteri terdiri perempuan dari berbagai latar belakang (tokoh masyarakat, pensiunan, akademisi, LSM, ormas, media massa, dll) yang memiliki kepedulian untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Mereka bersatu melalui wadah ini, mengumpulkan dana untuk membangun kredit mikro yang disalurkan kepada perempuan yang membutuhkan dana untuk usaha kecil. Sementara itu UPT PKTK dibentuk untuk menolong perempuan korban kekerasan agar lebih mudah melakukan proses

---

<sup>10</sup> Vicky Randal. 1987. *Women and Politics. An International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press. Hal. 19-21. Baca juga Siti Mardiah Mulia dan Anik Farida, 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 16-17. Lihat juga Ani Widayanti Soetjipto, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hal. 2 dan hal. 15-17.

hukum dan memperoleh pertolongan psikologis. Dibanding LIP, UPT PKTK mempunyai kinerja yang sangat baik sampai dengan saat ini.

Selain hak bekerjasama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan di tingkat Provinsi Lampung, kerjasama Pusat Studi Wanita dan khususnya penulis dengan Bagian atau Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat Kabupaten/Kota juga mendorong munculnya dialog budaya dan agama untuk menghilangkan hambatan bagi pemberdayaan perempuan di bidang politik. Berbagai serial dialog yang pernah penulis ikuti sebagai pembicara antara lain di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, serta Kota Bandar Lampung.

Seperti pada tingkat Provinsi Lampung, serial dialog pada tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya bagus untuk membangun kesadaran perempuan tentang hak politik mereka serta tentang kewajiban mereka untuk ikut serta memberikan kontribusi positif dalam kehidupan politik. Selain itu serial dialog juga berhasil mengurangi resistensi dari berbagai kalangan yang antipasti terhadap upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan politik perempuan berdasar asumsi salah bahwa gender dan pemberdayaan politik perempuan adalah konsep barat dan peniruan terhadap budaya bangsa barat. Pada umumnya dialog intensif dapat mengikis resistensi dan antipasti ini dan bahkan dalam beberapa kasus berubah menjadi dukungan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan politik. Dialog di Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, dan Lampung Tengah adalah dialog yang sangat berhasil mengurangi resistensi tokoh adat dan agama terhadap pemberdayaan politik perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, pengembangan lembaga serta kerjasama dengan lembaga pada tingkat *closer proximity* yang lebih dengan dengan masyarakat akar rumput lebih efektif mengurangi resistensi terhadap upaya pemberdayaan politik perempuan serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan politik.

10

Selain melakukan serial dialog, maka kerjasama dengan lembaga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga bermanfaat untuk membangun kesadaran dan responsifitas gender aparat pemerintah, sekaligus ketrampilan teknis aparat pemerintah melakukan perencanaan pembangunan dan anggaran responsif gender. Rencana pembangunan dan anggaran responsif gender sangat penting maknanya untuk terlaksananya kegiatan pemberdayaan politik perempuan karena peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan masih sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas masih menggantungkan dorongan pemerintah untuk melakukan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis dalam mendorong pengarusutamaan gender dan pemberdayaan politik perempuan melalui pembangunan kesadaran dan penguatan ketrampilan dukungan dari kalangan pemerintah adalah kerjasama semiloka dan pelatihan pengarusutamaan gender pembangunan serta perencanaan pembangunan responsive gender dengan pemerintah Provinsi Lampung melalui kegiatan di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Bappeda, pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Pemerintah Kota Metro. Di tingkat Provinsi, satuan kerja yang secara khusus mengadakan pelatihan sejenis adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Kantor Inspektorat Provinsi Lampung. Pada Kantor Inspektorat Provinsi Lampung, pelatihan bersama antara kantor ini dengan Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan FISIP



Unila melalui penulis sebagai narasumber adalah sosialisasi dan membangun kesadaran para inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tentang perlunya sensitivitas gender dalam kegiatan pengawasan pembangunan di daerah.

### **Kegiatan Riset untuk Memahami masalah dan Menyediakan Data**

Selain melakukan kegiatan bersama dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat dan pemerintah untuk membangun jaringan dukungan pemberdayaan politik perempuan, maka penulis juga melakukan berbagai penelitian ilmiah maupun penelitian terapan untuk dapat memahami masalah berkenaan dengan pemberdayaan politik perempuan dan pengarusutamaan gender dengan lebih baik. Riset juga dibutuhkan untuk dapat menyediakan data guna penyusunan rekomendasi pemecahan masalah.

Penelitian dan karya ilmiah yang pernah penulis lakukan dan tuliskan antara lain adalah:

- (1) Laporan penelitian tentang *Diskriminasi Etnis di Kalangan Pedagang Pasar di Bandarlampung* (2012)
- (2) *Gender in the Decision making of Coastal Resorce Management in Two Coastal Areas in Indonesia* (Jurnal Administratio, 2012).
- (3) *Independensi Pemberian Suara oleh Mahasiswi Pemilih Pemula* (Prosiding seminar Hasil-Hasil Penelitian Universitas Lampung, 2011)
- (4) *Analisis Gender terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Gender di Kabupaten Lampung Selatan* (Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Universitas Lampung, 2011).
- (5) *Jender dalam Politik Partai-Partai* (Jurnal Sains dan Teknologi Lampung yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, 2008);
- (6) *Etika Politik: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Indonesia* diterbitkan dalam *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan, Bandarlampung pada 2005;
- (7) *Perempuan, Politik dan Islam* diterbitkan dalam *Jurnal Analisis* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandarlampung tahun 2004;
- (8) *Buku Profil Jender di Provinsi Lampung* (diterbitkan oleh UNFPA bekerjasama dengan BPS dan Menteri UPW, 2001);
- (9) *Buku Profil Sumberdaya Perempuan di Kabupaten Lampung Timur* (Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2001);



- (10) *Peran Perempuan dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Lampung* (Laporan Teknis Proyek Pesisir Provinsi Lampung)
- (11) *Evaluasi Sistem Pemilu* (Bab dalam buku *Pemilu 1999 di Lampung* sebagai hasil kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan FISIP Universitas Lampung);
- (12) *Studi Keberdayaan Ekonomi dan Marginalisasi Wanita Tani di Pedesaan* (Jurnal Sosio Ekonomika, 1999);
- (13) *Analisis Data Sekunder dalam Penelitian Sosial* (Prosiding Seminar Lokakarya Metodologi Penelitian Sosial oleh FISIP Universitas Lampung, 1997);
- (14) *Partisipasi Politik wanita di Indonesia* (Jurnal komunitas, 1995);
- (15) *Konsep dan Implikasi Jender* (Monografi Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 1997);
- (16) *Wanita dan Karir* (Monografi Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 1997).

### **Pengembangan Kajian dan PBM Pendidikan Tinggi**

Pengembangan jaringan dukungan bagi pemberdayaan politik perempuan juga dilakukan dengan mengembangkan kajian khusus di perguruan tinggi. Untuk itu penulis telah mengusulkan dimasukkannya mata kuliah gender dan politik dalam kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan karena generasi muda peserta didik perlu mendapat pemahaman teoritik mengenai mengapa teori-teori gender dan feminisme dalam politik perlu dipelajari dan bagaimana perkembangannya dalam studi politik dan pemerintahan di berbagai belahan dunia lainnya. Mata kuliah ini juga diperlukan untuk membangun kesadaran makna penting gender dan pemberdayaan politik perempuan dalam pembangunan demokrasi.

Sebagai hasil upaya tersebut, maka semenjak tahun 2011 mata kuliah gender dan politik telah menjadi mata kuliah wajib di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung. Disamping itu, mata kuliah gender juga diajarkan di Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung. Melalui mata kuliah ini mahasiswa juga dipertajam kemampuannya untuk melakukan riset atau penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tema gender dalam pembangunan serta pemberayaan politik perempuan.

### **Simpulan**

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kegiatan tridarma perguruan tinggi yang telah penulis lakukan semenjak sekitar pertengahan tahun 1990an sampai dengan saat ini berfokus pada upaya untuk membangun jaringan dukungan untuk pemberdayaan politik perempuan guna membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Upaya ini didasarkan pada keyakinan bahwa selama perempuan masih

tersingkir dari pengelolaan kehidupan public dan politik maka sesungguhnya tidak ada demokrasi. Karena itu pengembangan materi ajar serta riset di perguruan tinggi tentang gender dan politik perlu dibarengi dengan pengembangan jaringan di masyarakat karena perempuan tidak mungkin dapat berjuang sendiri-sendiri agar dapat menjadi aktor politik yang berdaya. Pemberdayaan itu hanya dapat dilakukan dengan membangun jaringan yang kuat dari seluruh komponen masyarakat yang peduli

# Membangun Demokrasi Melalui Pengembangan Jaringan Dukungan

ORIGINALITY REPORT

# 6%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet	60 words — 2%
2	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	40 words — 1%
3	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	20 words — 1%
4	<a href="http://www.salimah.or.id">www.salimah.or.id</a> Internet	14 words — < 1%
5	<a href="http://perpustakaan.menlh.go.id">perpustakaan.menlh.go.id</a> Internet	13 words — < 1%
6	<a href="http://academic.oup.com">academic.oup.com</a> Internet	12 words — < 1%
7	<a href="http://www.jdih-gresik.net">www.jdih-gresik.net</a> Internet	9 words — < 1%
8	<a href="http://sk.sagepub.com">sk.sagepub.com</a> Internet	9 words — < 1%
9	<a href="http://lup.lub.lu.se">lup.lub.lu.se</a> Internet	9 words — < 1%
10	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	8 words — < 1%



11 Internet

8 words — < 1%

12 [archive.ipu.org](http://archive.ipu.org)  
Internet

4 words — < 1%

---

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE  
BIBLIOGRAPHY ON